

ANALISIS KETIMPANGAN ANTAR WILAYAH DI 35 KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA

Yerikha Christi Gratia^{1✉}, Nugroho SBM²

^{1,2}Departemen IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

✉Email: yerikha@students.undip.ac.id

Abstract

Indonesia has thousands of islands that is separated by ocean and strait that make one island with another island have different characteristics both in terms of social, economic and cultura. Each region has a different natural potential and quality of resources, causing regional disparity.

This study aims to determine the impact of fiscal decentralization, direct expenditure, indirect expenditure, inflation, and labor on regional disparity in 35 districts/cities in Central Java Province from 2011 to 2017. This study uses secondary data obtained from the Agency Central Statistics of Central Java Province, Director General of Fiscal Balance and World Bank. This research uses panel data method which consists of 35 regencies / cities in Central Java Province for 7 years.

From the analysis it is known that the variable degree of fiscal decentralization, direct expenditure, indirect expenditure, inflation, and labor affect the inequality between regions in 35 districts / cities in Central Java Province. With 5% degree of reliance. Fiscal decentralization, direct expenditure and labor have a positive influence on regional disparity in 35 districts / cities in Central Java Province, while indirect spending and inflation have a negative effect on regional disparity in 35 districts / cities in Central Java Province.

Keywords: Regional Disparity, Fiscal Decentralization

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai suatu negara yang terdiri dari ribuan pulau, perbedaan karakteristik wilayah adalah konsekuensi yang tidak dapat dihindari. Karakteristik wilayah mempunyai pengaruh kuat pada terciptanya pembangunan ekonomi, sehingga suatu kewajiban bila pola pembangunan ekonomi di Indonesia tidak seragam. Ketidaksegaraman ini berpengaruh pada kemampuan suatu daerah untuk tumbuh dimana beberapa wilayah dapat tumbuh dengan cepat sementara wilayah lainnya tumbuh dengan lambat. Kemampuan tumbuh ini kemudian menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah di Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan agar daerah dapat mengelola daerahnya sendiri dengan kemampuan yang dimilikinya sehingga akan mengurangi ketimpangan. Kebijakan otonomi daerah sejak tahun 2001 dirasa telah menurunkan derajat eksploitasi ekonomi antar wilayah. Namun, desentralisasi juga membawa dampak buruk mulai tingkat kabupaten/kota (bukan pada tingkat provinsi), yakni terjadinya pemekaran wilayah dan adanya pemilihan kepala daerah, pembatasan

kepala daerah juga terjadi untuk menyaring warga asli. Maka, semakin meningkat orientasi ke dalam wilayah dan menyurutkan kerjasama antar wilayah (Sastra, 2017).

TINJAUAN PUSTAKA

Ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah merupakan fenomena umum yang terjadi dalam proses pembangunan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada awalnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda sehingga pada setiap daerah terdapat wilayah relatif maju (*developed region*) dan wilayah relatif terbelakang (*underdeveloped region*) (Sjafrizal, 2014).

Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Antar Wilayah

Desentralisasi fiskal dapat membawa dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi fiskal dapat mendorong ke arah ketidakstabilan ekonomi makro, yang pada gilirannya akan menghambat pertumbuhan ekonomi, sebab desentralisasi fiskal dapat mengurangi pengeluaran pemerintah dan pajak yang berbasis pusat yang dapat digunakan untuk melakukan fungsi stabilisasi (Saputra, 2013).

Desentralisasi fiskal juga dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan karena tidak meratanya pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Desentralisasi fiskal menjadikan daerah memiliki kewenangan untuk mengurus daerahnya sendiri, sementara potensi daerah berbeda-beda yang menyebabkan daerah yang kaya akan potensi alam lebih cepat tumbuh dibandingkan dengan daerah yang potensi alamnya sedikit.

Dana Perimbangan sejak diberlakukannya desentralisasi fiskal khususnya DAU yang tujuan awalnya untuk mengurangi ketimpangan justru digunakan untuk membiayai gaji pegawai. Padahal untuk mengurangi ketimpangan DAU tersebut seharusnya digunakan untuk belanja modal.

Belanja Langsung Terhadap Ketimpangan Antar Wilayah

Tingkat efektifitas pengeluaran daerah dapat diukur melalui seberapa besar pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai. Hal ini disebabkan karena pengeluaran daerah lebih berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dimana secara langsung akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung. Lalu secara tidak langsung pertumbuhan ekonomi yang dirasakan akan menimbulkan ketimpangan karena berbagai faktor. Pengambilan keputusan dalam alokasi anggaran belanja daerah mempengaruhi besar ketimpangan, karena daerah yang dapat mengalokasikan pada belanja langsung atau bersifat investasi cenderung pertumbuhan ekonominya lebih cepat dari daerah yang alokasi belanja langsungnya sedikit.

Belanja Tidak Langsung Terhadap Ketimpangan Antar Wilayah

Bantuan keuangan pusat kepada daerah di Indonesia dilakukan dalam bentuk DAU (*block grant*), DAK (*spresific grant*) dan dana tugas pembantuan. Bantuan keuangan yang tujuannya mencegah terjadinya kesenjangan daerah adalah DAU. Metode DAU sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan daerah kaya dan miskin memuat dua komponen yaitu pemenuhan alokasi dasar (gaji PNS daerah) dan celah fiskal (*fiscal gap*). Celah fiskal pastinya dialami oleh daerah-daerah miskin (miskin SDA dan PAD) sehingga tidak memiliki kemampuan pendanaan dalam menjalankan program pembangunannya.

Inflasi Terhadap Ketimpangan Antar Wilayah

Inflasi dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh penurunan GDP riil. Uraian mengenai hal ini dapat dilakukan dalam dua tahap, yakni: Pertama, jika inflasi meningkat maka bank sentral akan merespon dengan cara menaikkan tingkat suku bunga acuan Bank Sentral (BI rate). Tahap ini menjelaskan bahwa hubungan antara inflasi dan suku bunga merupakan hubungan yang positif. Kedua, jika tingkat suku bunga meningkat, maka akan berpengaruh terhadap penurunan GDP riil. Tahap ini menjelaskan bahwa hubungan antara suku bunga dan GDP riil bersifat negatif. Argumen terhadap kondisi tersebut dapat dilakukan dengan arah yang berlawanan atau berbeda. Jika tingkat inflasi menurun menyebabkan GDP riil meningkat atau perekonomian keluar dari resesi ekonomi (Natsir, 2014).

Jika inflasi di suatu daerah tinggi maka pertumbuhan ekonomi akan turun, sehingga daerah-daerah dengan inflasi yang tinggi pertumbuhannya rendah, sedangkan daerah dengan inflasi rendah memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka terjadi ketimpangan antar wilayah.

Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan

Terdapat dua sektor di dalam perekonomian negara sedang berkembang, yaitu sektor modern dan sektor tradisional. Sektor tradisional tidak hanya berupa sektor pertanian di pedesaan, melainkan juga termasuk sektor informal di perkotaan (pedagang kaki lima, pengecer, pedagang angkringan). Sektor informal mampu menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada selama berlangsungnya proses industrialisasi, sehingga disebut katub pengaman ketenagakerjaan. Dengan terserapnya kelebihan tenaga kerja disektor industri (sektor modern) oleh sektor informal, maka pada suatu saat tingkat upah di pedesaan akan meningkat. Peningkatan upah ini akan mengurangi perbedaan tingkat pendapatan antara pedesaan dan perkotaan, sehingga kelebihan penawaran pekerja tidak menimbulkan masalah pada pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan ketimpangan antar wilayah.

Definisi Operasional Variabel

Ketimpangan

Ketimpangan diukur dengan ukuran ketimpangan yang dikembangkan oleh Williamson. Berikut rumusan Indeks Williamson:

$$VW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)F_i/N}}{Y} \quad (1)$$

Keterangan:

VW: Indeks Williamson

Y_i : Pendapatan Per Kapita di wilayah ke-i

Y : Pendapatan Perkapita Rata-rata Seluruh Daerah

F_i : Populasi di Wilayah ke-i

N : Populasi Total

Apabila Indeks Williamson menunjukkan hasil mendekati angka 1, atau lebih tinggi dari 1, maka tingkat ketimpangan sangat tinggi. Dan apabila Indeks Williamson menunjukkan hasil mendekati angka 0 maka tingkat ketimpangan sangat rendah atau distribusi pendapatan terjadi secara merata digambarkan dengan satuan indeks.

Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal (*Enhanced Fiscal Decentralization Index/EFDI*) digunakan dalam penelitian untuk menggambarkan tingkat pelaksanaan desentralisasi fiskal di Provinsi Jawa Tengah. Variabel EFDI yang dikembangkan oleh Vo (2010). Derajat desentralisasi fiskal diolah dengan rumus sebagai berikut:

$$DF_{it} = \frac{PAD_{it}}{TPD_{it}} \times 100\% \quad (2)$$

Keterangan:

DF_{it} : Derajat Desentralisasi Fiskal Provinsi i, tahun t

PAD_{it} : Pendapatan Asli Daerah Provinsi i, tahun t

TPD_{it} : Total Penerimaan Daerah Provinsi i, tahun t.

Semakin besar nilai derajat desentralisasi fiskal maka semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal di wilayah tersebut. Semakin tinggi nilai derajat desentralisasi fiskal menunjukkan semakin tinggi kemampuan daerah tersebut dalam pengelolaan keuangan daerah dan semakin rendah ketergantungan daerah tersebut terhadap pemerintah pusat.

Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung pada umumnya dibagi menjadi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Data belanja tidak langsung pemerintah didapatkan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Belanja tidak langsung ditunjukkan dengan satuan rupiah.

Belanja Langsung

Belanja langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja jenis ini pada umumnya dibagi menjadi belanja pegawai, belanja

barang dan jasa, dan belanja modal. Data belanja langsung dalam penelitian ini diambil dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2011 sampai dengan tahun 2017. Belanja tidak langsung ditunjukkan dengan satuan rupiah.

Inflasi

Definisi yang dikemukakan oleh Suseno dan Astiyah (2009:3) inflasi adalah suatu kecenderungan meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Data inflasi dalam penelitian ini menggunakan data inflasi pada 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2011 sampai dengan tahun 2017. Inflasi ditunjukkan dengan satuan persen.

Tenaga Kerja

Yang disebut tenaga kerja adalah seluruh penduduk yang dianggap mempunyai potensi untuk bekerja secara produktif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data jumlah angkatan kerja yang bekerja pada 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah yang diambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Ditunjukkan dengan satuan jiwa.

Populasi dan Sampel

Penelitian ini meneliti keseluruhan populasi Provinsi Jawa Tengah tahun 2011 sampai dengan 2017. Objek penelitian adalah 35 Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder bentuk panel data. Data jenis ini merupakan data yang terdiri atas sekumpulan subjek penelitian sepanjang periode tertentu (penggabungan antara data *time series* dan *cross section*). Data panel mampu menjelaskan model secara kompleks dan lebih informative (Gujarati dan Porter, 2009). Data sekunder bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis data panel (*time series* dan *cross section*) untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh derajat desentralisasi fiskal, belanja langsung, belanja tidak langsung, inflasi dan tenaga kerja terhadap ketimpangan antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Alat analisis yang digunakan adalah Eviews versi 10. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi *Fixed Effect Model* dan deteksi penyimpangan asumsi klasik yang meliputi deteksi multikolinearitas, deteksi heteroskedastisitas, deteksi autokorelasi, dan deteksi normalitas.

Model Asli:

$$KAW = \beta_0 + \beta_1 DDF + \beta_2 BL + \beta_3 BTL + \beta_4 INF + \beta_5 TK \quad (3)$$

Dilinearkan menjadi:

$$KAW = \beta_0 + \beta_1 DDF + \beta_2 \log BL + \beta_3 \log BTL + \beta_4 INF + \beta_5 \log TK \quad (4)$$

Keterangan:

- KAW = Ketimpangan Antar Wilayah
- DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal
- BL = Belanja Langsung
- BTL = Belanja Tidak Langsung
- INF = Inflasi
- TK = Tenaga Kerja

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deteksi Asumsi Klasik

Deteksi Normalitas

Deteksi normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variable pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal, seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan nilai residual mengikuti distribusi normal (Ghozali, 2014). Apabila asumsi ini tidak terpenuhi maka uji statistik menjadi tidak berlaku. Deteksi normalitas dapat dideteksi dari nilai probabilitas Jarque-Berra (JB).

Tabel 1
Deteksi Normalitas

<i>Jarque-Bera</i>	<i>Probability</i>
0,297682	0,861706

Sumber: Hasil olah data dengan Eviews 10

Hasil deteksi normalitas dengan deteksi nilai probabilitas Jarque-Berra (JB) yang ditunjukkan oleh Tabel 1 menunjukkan nilai hasil uji probability sebesar 0,861 yang berarti bahwa data terdistribusi normal.

Deteksi Multikolinearitas

Deteksi multikolinearitas digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan linier diantara variabel-variabel bebas dalam model regresi. Variabel-variabel bebas berkorelasi dengan sempurna maka disebut “multikolinearitas sempurna” (*perfect multicollinearity*). Variabel-variabel berkorelasi secara sempurna, maka metode kuadrat terkecil tidak bisa digunakan. (Sumodiningrat, 1999). Variabel-variabel tidak terjadi multikolinearitas (non multikolinearitas) artinya antara variabel independen yang satu dengan independen yang lain dalam model regresi tidak saling berhubungan secara sempurna atau mendekati sempurna. (Algifari, 2000).

Tabel 2
Deteksi Multikolinearitas

	DDF	LOGBL	LOGBTL	INF	LOGTK
DDF	1.000000	0.412420	-0.116627	-0.039741	-0.354965
LOGBL	0.412420	1.000000	0.682016	-0.086857	0.355973
LOGBTL	-0.116627	0.682016	1.000000	-0.061036	0.727694
INF	-0.039741	-0.086857	-0.061036	1.000000	0.288276

LOGTK	-0.354965	0.355973	0.727694	0.288276	1.000000
-------	-----------	----------	----------	----------	----------

Sumber: Hasil olah data dengan Eviews 10

Tabel 2 menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen. Hal ini ditunjukkan oleh *correlation matrix* yang kurang dari 0,8 sesuai dengan pernyataan Gujarati dan Porter (2009). Hasil deteksi multikolinearitas diatas dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel dalam model bebas adanya multikolinearitas.

Deteksi Heteroskedastisitas

Deteksi heteroskedastisitas merupakan deteksi untuk mengetahui apakah seluruh faktor gangguan tidak memiliki varian yang sama atau variannya tidak konstan. Konsekuensi adanya heterokedastisitas dalam model regresi adalah penaksir (estimator) yang diperoleh tidak efisien, baik dalam sampel kecil maupun sampel besar, walaupun penaksir yang dieproleh menggambarkan populasinya (tidak bias) dan bertambahnta sampel yang digunakan akan mendekati nilai sebenarnya (Algifari, 2000).

Tabel 3
Deteksi Heteroskedastisitas

<i>F-statistic</i>	2.321658
<i>Obs*R-squared</i>	42.06631

Sumber: hasil olah data dengan Eviews 10

Berdasarkan hasil deteksi heteroskedastisitas terhadap model menunjukkan tidak terjadinya heterokedastisitas pada model. Ditunjukkan oleh nilai *ObsR*-squared* > 0,05.

Deteksi Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi (hubungan) yang terjadi diantara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu atau tersusun dalam rangkaian ruang. (Sumodiningrat, 1999). Artinya, adanya korelasi antaranggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. Konsekuensi dari adanya autokorelasi dalam suatu model regresi adalah varian sampel tidak dapat menggambarkan varian populasinya. Model regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel dependen pada nilai variable independen tertentu. (Algifari, 2000).

Tabel 4
Deteksi Autokorelasi

<i>F-statistic</i>	149.0455	<i>Prob. F(2,237)</i>	0.0000
<i>Obs *R-squared</i>	136.4857	<i>Prob. Chi-square(2)</i>	0.0000

Sumber: Hasil olah data Eviews 10

Berdasarkan hasil deteksi autokorelasi pada tabel 4.9, statistic Obs*R Squared memberikan nilai 136.48. Nilai p value bagi statistic ini adalah 0.00, lebih rendah dari tingkat signifikansi yang biasa digunakan (5%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi dalam model.

Uji Analisis Regresi

Tabel 5
Hasil Deteksi Hausman

Test Summary	Chi-Sq.statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Period random	24.475576	5	0.0002

Sumber: Hasil olah data dengan Eviews 10

Hasil deteksi Hausman pada tabel 5 menunjukkan probabilitas sebesar 0.0002 yang berarti menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) untuk menganalisa.

Tabel 6
Hasil Deteksi Chow

Effect test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.554553	(6,232)	0.0205
Cross-section Chi-square	15.609962	6	0.0160

Sumber : Hasil olah data dengan Eviews 10

Hasil deteksi Chow pada tabel diatas, diperoleh nilai probabilitas kurang dari tingkat signifikansi 5%, maka menggunakan *Fixed Effect Model* untuk menganalisa.

Tabel 7
Fixed Effect Model

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.042982	0.413278	0.104003	0.9173
DDF	0.008571	0.001267	6.766464	0.0000
LOGBL	0.012404	0.019547	0.634557	0.5263
LOGBTL	-0.053052	0.025228	-2.102924	0.0365
INF	-0.006325	0.002495	-2.534502	0.0119
LOGTK	0.082695	0.014346	5.764410	0.0000

Model Regresi:

$$KAW = 0.042 + 0.008DDF + 0.012LOGBL - 0.053LOGBTL - 0.006INF + 0.082LOGTK$$

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Konstanta sebesar 0.042 artinya jika DDF, BL, BTL, INF, dan TK nilainya adalah 0, maka ketimpangan antar wilayah (KAW) nilainya 0.042.
- b. Variabel DDF berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan antar wilayah, hal tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar 0.008 dan

- probabilitas 0.000, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan DDF mengalami kenaikan 1%, maka nilai KAW akan mengalami kenaikan sebesar 0.008. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara DDF dengan KAW, semakin naik DDF maka semakin meningkat KAW.
- c. Variabel BL berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan antar wilayah, hal tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar +0.012 dan probabilitas 0.52. Variabel BL berpengaruh tidak signifikan karena belanja langsung berkaitan erat dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun dalam jangka setahun sekali sehingga pengeluaran pemerintah sudah terencana dalam APBD dan tidak mempengaruhi ketimpangan antar wilayah.
 - d. Variabel BTL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan antar wilayah, hal tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar -0.053 dan probabilitas 0.03, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan BTL mengalami kenaikan 1%, maka nilai KAW akan mengalami penurunan sebesar 0.053. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara BTL dengan KAW, semakin naik BTL maka semakin rendah tingkat KAW.
 - e. Variabel INF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan antar wilayah, hal tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar -0.006 dan probabilitas 0.08, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan INF mengalami kenaikan 1%, maka nilai KAW akan mengalami penurunan sebesar 0.006. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara INF dengan KAW, semakin naik INF maka semakin rendah tingkat KAW.
 - f. Variabel TK berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan antar wilayah, hal tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar 0.082 dan probabilitas 0.000, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan TK mengalami kenaikan 1%, maka nilai KAW akan mengalami kenaikan sebesar 0.082. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara TK dengan KAW, semakin naik TK maka semakin meningkat KAW.

KESIMPULAN

Derajat desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Belanja langsung memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Belanja tidak langsung memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Inflasi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Tenaga kerja yang merupakan angkatan kerja yang bekerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Secara simultan variabel derajat desentralisasi fiskal, belanja langsung, belanja tidak langsung, inflasi dan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

Algifari. (2000). *Analisis Teori Regresi : Teori Kasus dan Solusi*. Yogyakarta: BPFE.

- Ghozali, I. (2014). *Structural Equation Modeling, Metode Alternatif Dengan Partial Least Square (PLS). Edisi 4*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics (5th Edition)*. New York: McGraw-Hill.
- Natsir, M. 2014. *Ekonomi Moneter dan Perbankan Sentral*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Saputra, Bambang. (2013). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Borneo Administrator Vol. 9 No. 1*.
- Sastra, Eka. (2017). *Kesenjangan Ekonomi* . Jakarta: Expose.
- Sjafrizal. (2014). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumodiningrat, G. (1999). *Ekonometrika Pengantar*. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Suseno dan Astiyah. (2009). *Inflasi. Seri Kebanksentralan No. 22*. Jakarta: Bank Indonesia
- Vo, Duc. 2010. The Economic of Measuring Fiscal Decentralization. *Jurnal of Economics Surveys Vol. 24, No. 4*.